



Evaluasi Percepatan Capaian Target RPJMD

Akuntabilitas Menjadi Penunjang Capaian Kinerja

AKUNTABILITAS menjadi penunjang untuk capaian kinerja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan tetap berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015. Demikian disampaikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat membuka evaluasi percepatan capaian target RPJMD di Ruang Pertemuan Gedung Sewaka Dharma, Rabu (25/3) kemarin. Evaluasi yang berlangsung dua hari tersebut juga dihadiri Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan seluruh kepala SKPD.

Rai Mantra menambahkan, untuk mencapai akuntabilitas yang maksimal, setiap SKPD harus didukung personaliti atau pegawai yang memiliki komitmen kuat sehingga dapat mencapai hasil program sesuai tertuang dalam RPJMD.

Dalam kesempatan tersebut, Rai Mantra juga menyampaikan arahan yang diberikan Presiden RI beberapa waktu lalu. Dalam arahan Presiden tersebut ditegaskan untuk pengadaan barang dan jasa

hendaknya menggunakan *e-catalog*. Mengingat sistem ini memiliki tingkat akuntabilitas mencapai 100 persen. Dalam *e-catalog*, menurut Rai Mantra, barang/jasa telah ditetapkan secara pasti. Di samping juga masalah perizinan, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta ketahanan pangan dan lingkungan menjadi arahan Presiden RI.

Di Kota Denpasar sendiri untuk perizinan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan telah berjalan dengan baik. Tentunya ini harus terus ditingkatkan sehingga kemanfaatannya pada masyarakat makin dirasakan.

Sementara itu, Prof. Dr. I Wayan Ramantha, M.M., Ak., CPA, mewakili kelompok ahli pembangunan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangkuman pemikiran menyampaikan di samping dalam laporan kinerja yang dirangkum pihak eksternal melalui dokumen, dalam presentasi yang disampaikan sudah ada penjelasan tambahan. Secara keseluruhan dasar evaluasi di samping RPJMD juga beberapa indikator makro dan umum lainnya yang perlu

mendapat perhatian. "Tidak hanya capaian kinerja secara kuantitatif saja menjadi perhatian, tetapi sifatnya kualitatif seperti tertib administrasi dan keuangan daerah harus menjadi perhatian," ujarnya sambil menambahkan, termasuk juga pengawasan pembangunan merupakan manajemen tata kelola pemerintahan.

Prof. Ramantha mengatakannya pemaparan dari perwakilan SKPD sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan sehingga tercapai sesuai dengan RPJMD. Ke depannya, Ramantha menyampaikan RPJMD bisa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan riil masyarakat, sehingga dalam perjalanannya RPJMD bisa direvisi sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk melakukan evaluasi terhadap RPJMD dipakai alat ukur/indikator makro, dilakukan secara berjenjang mulai dari misi, strategi dan kebijakan, program, indeks kerja utama (IKU) dan substansi kegiatan. Indikator makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPd) dan dijabarkan dalam APBD.

Sedangkan di dalam pelaksanaan pembangunan, indikator yang dipakai adalah Indikator *Input*, *Output* dan *Outcome*. Sedangkan untuk pengawasan yang dipakai dasar adalah tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah (*good governance*). Untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan diperlukan pemahaman terhadap keterkaitan antara misi sampai dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, sehingga diharapkan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK. (ad9)



SKPD - Wali Kota Rai Mantra memberikan pengarahan kepada kepala SKPD Pemkot Denpasar untuk percepatan capaian target RPJMD, Rabu (25/3) kemarin di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang.



Kasus Dermaga Gunaksa

Sembilan Lahan Fiktif Dapat Ganti Rugi

Semarang (Bali Post) -

Tim Sembilan yang diketuai Sekkab Klungkung Ketut Janapria kini siap-siap menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam proses penyidikan, tim menemukan ada 9 lahan fiktif yang mendapat ganti rugi.

"Tim Sembilan telah melakukan ganti rugi terhadap 100 bidang lahan untuk dermaga. Tapi setelah dilakukan pengukuran dan dicek berdasarkan keterangan saksi dari BPN, lahan yang diganti rugi sebenarnya hanya 91 bidang. Jadi ada kelebihan sembilan bidang lagi yang diganti rugi oleh tim Sembilan," ujar Kasi Intel Kajari Klungkung, Suhadi, Rabu (25/3) kemarin.

Ia mengatakan sembilan bidang yang diganti rugi ini sudah jelas fiktif atau tanah negara yang diganti rugi. "Lahannya tidak ada digambar," ujarnya. Ia mengatakan luas lahan dari sembilan bidang tersebut hektaran. Sementara tim sembilan memberikan ganti rugi terhadap lahan yang fiktif tersebut mencapai miliaran rupiah. Parahnya lagi, dari sembilan bidang yang ditemukan fiktif, tujuh bidang lahan yang diganti rugi oleh tim Sembilan ternyata

pantai yang merupakan tanah negara. "Inilah kesalahan tim Sembilan, kenapa tidak diteliti atau diinventarisasi dulu sebelum diganti rugi," kata Suhadi.

Ia mengatakan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Klungkung telah melimpahkan berkas kasus tim pengadaan lahan dermaga tersebut ke tangan JPU. Pihak penyidik berencana akan melimpahkan berkas dan para tersangka (tim Sembilan) ke pengadilan Tipikor pada bulan April ini.

"Berkas dari tim Sembilan sudah rampung. Bahkan bulan April ini kita akan limpahkan ke pengadilan," ujar Suhadi. Menurutnya berkas dari tim Sembilan sudah tidak ada persoalan. Kini penyidik hanya tinggal melakukan koreksi terhadap berkas dari tim Sembilan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. "Tinggal dikoreksi saja. Siapa tahu ada yang salah ketik atau bagaimana jadi

perlu dikoreksi," ujarnya.

Sementara itu kasus korupsi yang ditangani Kajari Klungkung juga mendapat perhatian Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Momock Bambang Samiarso. Kemarin pagi bersama jajaran dan istri, Kajati, Momock melakukan kunjungan kerja ke kantor Kajari di Jalan Gajah Mada, Klungkung. Momock juga tidak menampik mengecek setiap perkara yang ditangani Kajari, termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dermaga yang melibatkan mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra. Bahkan ditemui se usai memberikan pengarahan, Kajati mengapresiasi kinerja Kajari Klungkung bersama jajarannya dalam menangani kasus korupsi tersebut. "Saya sangat mendukung sekali. Bahkan saya meminta Kajari bersama jajarannya maju terus," ujar Momock. (kmb)

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 16



Korupsi Beasiswa Stitna/Stikes

Penyidik Kejati Sita Berkas di Pemkab

Negara (Bali Post) -

Sejumlah jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati, Rabu (25/3) kemarin mendatangi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Jembrana dan menyita sejumlah berkas barang bukti. Berkas-berkas yang telah disiapkan itu terkait kasus dugaan korupsi Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Jembrana (Stitna) dan Stikes dengan tersangka mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa.

Informasi yang dihimpun, empat orang penyidik Kejati datang didampingi Kabag Umum Kejari I Gede Riasa berada di sekretariat sekitar satu jam. Penyidik diterima Asisten I I Made Sudiada, Asisten II I Ketut Windra, serta Kasubbag Bagian Hukum Ida Bagus Brahmantara. Penyitaan berkas ini tidak sampai menggeledah, pasalnya sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab berkas apa saja yang diperlukan.

Asisten I I Made Sudiada kepada wartawan membenarkan adanya penyidik yang datang menyita berkas. Menurutnya, penyidik agak lama kendati hanya

mengambil saja, karena harus mencocokkan berkas yang dimaksud. "Tinggal mencocokkan saja apa yang sudah kita siapkan, katanya sudah semua," terangnya. Berkas itu menurutnya seperti Peraturan Bupati (Perbup) dan dokumen-dokumen aturan lainnya yang terkait beasiswa Stitna/Stikes. Di antaranya Perbup 4 tahun 2009, tentang pemberian beasiswa kepada siswa SMU, SMA Kejuruan Umum dan mahasiswa tahun 2009, Permendagri 59 tahun 2007, Perubahan anggaran SKPD tahun 2009, perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006, tentang pengelolaan uang daerah, Perbup 3 tahun 2009, tentang penjabaran APBD serta Pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2010.

Berikut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beasiswa untuk Stitna/Stikes antara tahun 2009 dan 2010. Selain di Setda, tim penyidik juga mendatangi Dinas Dikporapabud, serta pihak Stitna dan Stikes. Di lokasi tersebut penyidik juga mengumpulkan bukti berkas. (kmb26)



Bali Post/olo

SITA - Penyidik Kejati memasukkan berkas ke mobil yang disita dari Setda Jembrana terkait kasus korupsi Beasiswa Stitna/Stikes.

Edisi : Kamis, 26 Maret 2014

Hal : 14



Pasar Kubutambahan Nunggu Setor Keuntungan Rp 30 Juta

Singaraja (Bali Post) -

Pihak pengelola pasar di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan menunggak menyetorkan *sharing* keuntungannya kepada pemerintah daerah. Sejak pengelolaan pasar itu diserahkan kepada pihak desa tahun 2007 silam, hingga tahun ini masih menyisakan tunggakan keuntungan sekitar Rp 30 juta. Menariknya, tunggakan penyetoran keuntungan, itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat mengaudit keuangan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng belum lama ini.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Buleleng I Putu Gede Satwikayadnya di ruang kerjanya Rabu (25/3) kemarin, membenarkan kalau perusahaan masih memiliki piutang dari pihak pengelola Pasar Kubutambahan. Dikatakan, ketika PD Pasar resmi melepas aset pasar tersebut, untuk dikelola pihak desa 2007 lalu, pihak perusahaan desa telah menyepakati teknis pembagian keuntungan pasar. Dari perjanjian itu, pihak desa menyetorkan keuntungannya dengan nilai antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000 setiap tahun. Pembagian *sharing* keuntungan ini sempat berjalan. Namun entah mengapa pihak pengelola Pasar Kubutambahan tiba-tiba menghentikan menyetorkan *sharing* keuntungan itu ke pemerintah daerah. Dari catatan pembukuan, keuntungan, dana

yang belum disetor sekitar Rp 30 juta. "Benar kita memiliki piutang dari pengelola Pasar Kubutambahan. Dan sampai sekarang belum dilunasi. Kami sudah berusaha menagih namun belum juga direspons," katanya.

Menyusul tunggakan piutang Pasar Kubutambahan itu, lanjut Satwikayadnya, upaya penagihan sudah dilakukan baik dengan cara bersurat resmi hingga mendekati pihak pengelola pasar. Bahkan, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, sempat turun tangan. Ia menginstruksikan agar utang tersebut disetor ke kas daerah.

Audit BPK

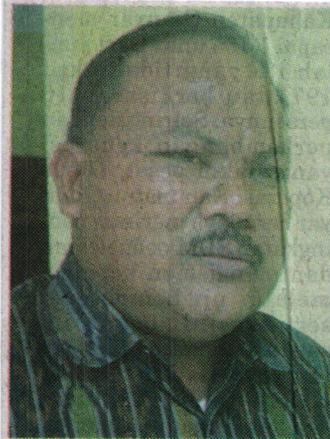
Hal ini dilakukan karena dari hasil audit BPK terhadap dokumen keuangan PD Pasar Buleleng belum lama ini, me-

nemukan penerimaan setoran dana keuntungan dari Pasar Kubutambahan itu belum masuk. Khawatir temuan ini berdampak terhadap penilaian BPK terhadap keuangan perusahaan, Satwikayadnya meminta agar utang itu secepatnya disetor ke kas daerah. "Kalau dibiarkan, kami khawatir BPK menilai pengelolaan keuangan kita tidak benar. Nah kami harapkan pihak pengelola segera melunasi utangnya itu," tegasnya.

Dihubungi terpisah tokoh masyarakat Kubutambahan, Ketut Warkadea, mengatakan, hak pengelolaan pasar di desanya itu diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati, yang terbit September 2007. Pada SK tersebut diatur, pihak pengelola wajib menyetorkan keuntungannya kepada pemerintah daerah. Namun sejak SK



Sambungan



BP/kmb38

Ketut Warkadea

itu terbit, pihak pengelola tidak menyetorkan dana keuntungannya. Hal ini dilakukan karena sampai tahun ini di pasar itu belum pernah ada bantuan perbaikan yang bersumber dari pemerintah daerah. Sebaliknya, sejak pasar itu dibangun di atas lahan satu hektar adalah dari dana swadaya warga dan iuran puluhan pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Selain itu, nilai setoran keuntungan antara Rp 400 hingga Rp 500 tiap tahun itu dianggap terlalu tinggi. Apalagi, pasar

tersebut merupakan pasar yang berlokasi di desa. Sudah pasti, pendapatannya tidak sama dengan pasar di perkotaan. "Sejauh ini belum ada bantuan untuk pemeliharaan bangunan. Bahkan, untuk membangun Pura Melanting, para pedagang yang mengeluarkan dana sendiri. Dengan pertimbangan itu setoran keuntungan itu menjadi masuk akal tidak dibayar," katanya.

Terkait tunggakan keuntungan pasar menjadi temuan BPK, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Buleleng ini menyarankan, agar pemerintah mencabut SK Bupati September 2007 itu tentang penunjukan pengelolaan pasar oleh desa adat. Itu artinya, kewajiban pihak pengelola menyetorkan keuntungannya juga ikut dihapuskan. Dengan demikian, tidak lagi muncul tunggakan dana dari keuntungan pengelolaan Pasar Kubutambahan. "SK itu dicabut saja, sehingga setoran keuntungan yang diminta kepada pihak pengelola bisa dihapuskan dan tidak lagi menjadi temuan BPK," sarannya. (kmb38)



Pemkot Denpasar Gelar Evaluasi Program APBD 2014 Percepatan Capaian Target RPJMD, Kinerja SKPD Harus Terukur

GUNA mencapai target program kerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar hingga tahun 2015, kinerja SKPD harus terukur dari setiap program yang dilaksanakan. Hal ini disamping untuk meningkatkan serapan APBD, juga untuk memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian disampaikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Mantra saat memberikan arahan pada rapat evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan, Rabu (25/3) kemarin di ruang pertemuan Gedung Graha Sewaka Dharma. Rapat evaluasi yang berlangsung selama dua hari juga dihadiri Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan seluruh Kepala SKPD di Pemkot Denpasar.

Lebih lanjut Rai Mantra menambahkan, evaluasi semacam ini rutin dilaksanakan tiap tahun, yang terpenting ada tindak lanjut dari evaluasi ini. Sebagai contoh evaluasi kegiatan 2013 yang dilaksanakan tahun 2014 ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti secara internal dan ada juga yang dapat diselesaikan dengan koordinasi dengan instansi lain. Tidak lanjut yang telah dilakukan harus jelas sehingga mengetahui capaian dari RPJMD Kota Denpasar. "Capaian target kinerja setiap SKPD harus terukur sehingga menjadi satu patokan untuk menindaklanjuti apa yang kurang dalam capaian RPJMD," ujar Rai Mantra. Yang tidak kalah pentingnya akuntabilitas atau kepatuhan harus menjadi penunjang dalam pencapaian target tersebut. Untuk mencapai semua ini dibutuhkan personality atau



RAPAT EVALUASI - Wali Kota Rai Mantra saat membuka rapat evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan, Rabu (25/3) kemarin di ruang pertemuan Gedung Graha Sewaka Dharma.

pegawai yang kuat untuk mencapai kinerja tersebut.

Rai Mantra berharap melalui hasil evaluasi ini dapat memberikan gambaran pada SKPD apa yang menjadi rekomendasi harus ditindaklanjuti termasuk juga capaian-capaian prestasi.

Untuk akuntabilitas, ke depannya pengadaan barang di setiap SKPD agar telah menggunakan *e-catalog*. Seperti dicontohkan oleh Presiden melalui Menteri Pertanian dalam pengadaan traktor cukup dengan menggunakan *e-catalog*. Karena semua jenis barang dalam pengadaan telah ada dalam *e-catalog* dengan proses yang sangat cepat. Pengadaan melalui *e-catalog*, menurut Rai Mantra, akuntabilitasnya 100 persen. Menurut Rai Mantra, bila tidak ada barang dalam *e-catalog* dapat diusulkan.

Dalam kesempatan tersebut, Rai Mantra menyampaikan arahan Presiden RI baru-baru ini yang meliputi masalah *e-catalog*, masalah perizinan termasuk juga masalah ketahanan pangan dan infrastruktur, pendidikan serta kesehatan. Secara garis besar apa yang menjadi arahan Presiden RI dilaksanakan dengan baik di Kota Denpasar seperti masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kepala Bagian Probang AAN Bagus Airawata menyampaikan evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kesesuaian dengan apa yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015. Evaluasi ini sangat peting mengingat sisa paruh waktu ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga semua program terealisasi sesuai dengan RPJMD. (ad4)

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 5



Bali Post/dok

PEMENTASAN - Panggung terbuka Ardha Candra yang menjadi tempat pementasan utama di Taman Budaya Denpasar.

Perusda Bali Ingin Kelola Art Center

Denpasar (Bali Post) -

Isu bahwa Art Center Denpasar bakal dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, mendekati kebenaran. Hingga saat ini, Perusda Bali masih berupaya untuk bisa mengelola Taman Budaya atau Art Center. Dari pandangan Perusda, UPT yang saat ini menangani Taman Budaya masih belum bisa mengelola pendapatan yang masuk. Dengan kata lain, setelah menerima uang, UPT Taman Budaya langsung menyetornya ke provinsi. Imbasnya, UPT tidak bisa melakukan pengembangan untuk menghasilkan keuntungan lebih bagi pendapatan daerah.

"Kalau Perusda diberi mengelola, saya kira akan lebih leluasa dalam hal sisi bisnisnya. Terutama, bagaimana *handle ticketing* yang baik, bagaimana *manage* segala ruangan yang ada di sana dengan baik dan termanfaatkan," ujar Direktur Teknis Akuisisi Perusda Bali I Wayan Tana, Rabu (25/3) kemarin.

Tana mengatakan, saat ini masih digodok aturan main untuk pengelolaan tersebut. Kemungkinan yang paling besar adalah maksimalisasi hari-hari yang tidak dimanfaatkan oleh UPT. Bila Perusda diizinkan untuk mengelola, pihaknya bisa membuat *event* di luar

Pesta Kesenian Bali (PKB) atau *event* lain yang digelar UPT.

"Kalau Perusda yang mengelola, berarti kita bikin *event* juga. *Event* itu berarti ada *ticketing*, sponsor, juga menyewakan beberapa tempat untuk satu *event exhibition*, kuliner, atau lainnya. Tiket masuk segala macam ada pergubnya, tetapi kalau kita menjual yang namanya pementasan, boleh kok (menarik harga di luar pergub - red)," tandasnya.

Tana juga menjamin tidak akan mematikan seniman bila pengelolaan Art Center diserahkan kepada Perusda.

Hal. 23
Dinas Kebudayaan

hal 1.

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 1 dan 23



Sambungan

Dinas Kebudayaan ✓

Dari Hal. 1

Sebaliknya, keuntungan yang nantinya diperoleh justru akan digunakan untuk menghidupkan seniman sebagai roh dari Art Center itu sendiri.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha membenarkan bila Perusda mengajukan permohonan untuk mengoptimalkan pendapatan Art Center. Namun, realisasinya dikatakan masih jauh lantaran masih melakukan pengkajian. Utamanya dari segi peraturan perundang-undangan, apakah memungkinkan bagi Perusda untuk ikut mengelola Art center.

“Yang jelas bukan jadi perusahaan daerah, arti-

nya perusahaan daerah mengajukan permohonan untuk bisa ikut mengoptimalkan Taman Budaya dari segi pendapatan. Cuma masalahnya kan harus jelas, apanya yang dikelola, itu yang masih perlu kita kaji,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Beratha, pemanfaatan gedung dan ruang-ruang di Art Center termasuk penyewaannya sudah diatur dalam peraturan gubernur. Oleh karena itu, akan sangat berhati-hati agar pengoptimalan pendapatan yang diajukan Perusda tidak memberatkan para seniman nantinya. Termasuk tidak mengganggu fungsi Taman Budaya sebagai pusat pengembangan dan pelestarian seni budaya. (kmb32)

hal. 2

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 1 dan 23



Tagih Piutang, ✓ Tim BRSUD Tabanan Diprotes

Tabanan (Bali Post) -

Sesuai instruksi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengkonfirmasi seluruh piutang, BRSUD Tabanan telah menurunkan tim di setiap desa. Namun, saat melakukan konfirmasi piutang, banyak masyarakat protes. Masyarakat yang menunggal pembayaran menuduh tim melakukan penangihan pajak.

Namun, dalam proses penagihan dari ribuan formulir konfirmasi yang disebarkan ke 133 desa di Tabanan, baru sekitar 95,36 persen yang kembali. Tidak hanya wilayah Tabanan, konfirmasi juga menjangkau desa di luar Tabanan dan di luar Bali.

Dari 5.400 piutang di bawah Rp 500.000 yang dikonfirmasi oleh pihak BRSUD, baru 110 orang yang membayar dengan total pembayaran Rp 7.826.000.

Direktur BRSUD Tabanan dr. Nyoman Susila, Selasa (24/3) memaparkan jika proses konfirmasi saat ini masih berjalan. Permasalahan yang dihadapi tim konfirmasi adalah komplain dari masyarakat yang mengira konfirmasi piutang tersebut adalah penagihan piutang pajak. Padahal, menurut Susila, konfirmasi tidak sama dengan penagihan. Konfirmasi bertujuan untuk meyakini apakah benar ada piutang atau tidak.

Kendala lain yang dihadapi tim adalah belum samanya persepsi antara tim konfirmasi dengan masyarakat. Banyak masyarakat menganggap piutang RS yang merupakan piutang pelayanan disamakan dengan piutang pajak. Padahal piutang pelayanan berbeda dengan piutang pajak atau piutang lainnya yang wajib dibayarkan.

Lanjut Susila, piutang di bawah Rp 500 ribu ini merupakan piutang dalam rentang 10 tahun. Tahun 2014 lalu BRSUD Tabanan telah mengkonfirmasi utang di atas Rp 2 juta. BPK kemudian meminta BRSUD Tabanan untuk mekonfirmasi semua piutang. Oleh karena bersifat sosial, tidak ada sanksi bagi masyarakat yang benar-benar tidak bisa membayar. "Tidak ada sanksi pelayanan atau dampak lain karena ini adalah fungsi sosial RS tetapi pengelolaan keuangan harus tetap dilakukan," ujar Susila.

Penyelesaian masalah piutang adalah salah satu langkah untuk membangun manajemen keuangan yang baik. Setelah tahap konfirmasi dilalui maka akan masuk ke tahap akhir yaitu penyisihan di neraca dan hapus buku. Untuk pengapusan tagihan, BRSUD Tabanan akan meminta rekomendasi dari KPPN. (kmb24)

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 13



Tak Maksimal, Pemanfaatan Dana Penyisihan PHR

Tersisa Rp 6 Miliar Lebih

Bangli (Bali Post) -

Dana penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang selama ini diterima Kabupaten Bangli ternyata belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Buktinya pada tahun anggaran 2014 lalu, dari Rp 17 miliar lebih yang diterima, bantuan dana PHR yang tersisa terbilang cukup tinggi yakni mencapai Rp 6 miliar lebih.

Berdasarkan laporan pemanfaatan relokasi bagi hasil penerimaan PHR Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Tahun anggaran 2014 triwulan IV yang disusun Bagian Keuangan Setda Bangli terungkap, total dana penyisihan PHR yang diterima tahun 2014 nilainya mencapai Rp 17.213.255.084. Dari jumlah tersebut, dana yang terpakai hanya Rp 11.034.859.864. Sedangkan sisanya Rp 6.178.395.220.

Dalam laporan yang disetorkan ke Pemprov Bali itu juga tertulis, kucuran dana penyisihan PHR yang diterima tak hanya digunakan untuk membiayai program yang dikerjakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Namun juga se-

jumlah program di lima SKPD lainnya. Di antaranya sebanyak Rp 4,7 miliar lebih dana penyisihan PHR digunakan untuk membiayai program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Selain itu Rp 2,4 miliar lebih digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan serta program penanganan dan pengelolaan persampahan yang dikerjakan Dinas Tata Kota.

Kucuran dana penyisihan PHR tersebut juga digunakan untuk membiayai program perencanaan tata ruang Rp 299 juta yang ditangani Bappeda. Sebanyak Rp 420

juta lebih juga digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang dikerjakan Badan Lingkungan Hidup. Tak hanya itu Rp 454 juta lebih digunakan Disperindag untuk membiayai program efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan berupa pembangunan dan renovasi Pasar Kidul serta kegiatan pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional.

Sedangkan untuk membiayai program yang dikerjakan Disbudpar yakni program pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya, bantuan dana penyisihan PHR yang



Sambungan

dimanfaatkan nilainya hanya Rp 2,6 miliar lebih.

Namun demikian, dalam laporan tersebut tidak dijelaskan secara rinci di mana lokasi kegiatan dari masing-masing program. Misalnya saja, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang dikerjakan Dinas PU. Dalam laporan itu hanya dicantumkan nama program dan kegiatan. Tidak disebutkan secara jelas di mana lokasi jalan yang direhabilitasi.

Terkait hal itu Kabag Keuangan Ketut Nurjana, Rabu kemarin mengatakan, soal rincian lokasi kegiatan yang dimaksud ada di masing-masing SKPD. Pihaknya di bagian keuangan hanya menyusun laporan yang diberikan dari masing-masing SKPD. Demikian juga mengenai penyebab adanya dana PHR yang tersisa. Dia hanya menyebutkan, sisa dana yang ada tidak lagi dikembalikan ke Pemrov Bali. Melainkan menjadi

silpa dan akan dipergunakan membiayai kegiatan tahun berikutnya.

Dia mengatakan dana penyisihan PHR yang selama ini diterima melalui Pemprov Bali nilainya tidak tentu. Besaran dana yang diterima tergantung dari pendapatan Kabupaten Badung dan Denpasar. Tetapi sesuai Keputusan Gubernur Bali No. 286/01-F/HK/2009, Kabupaten Bangli mendapatkan jatah penyisihan PHR 10,78 persen dari total dana yang dikumpul Pemprov Bali.

Menurutnya, bantuan berupa penyisihan PHR yang diterima selama ini sudah digunakan pemerintah sebagaimana peruntukannya. Sesuai dengan keputusan gubernur, Kabupaten Bangli telah menggunakan dana tersebut untuk membangun sarana pariwisata, kebersihan lingkungan, pelestarian budaya dan pembangunan lainnya yang menyentuh masyarakat secara langsung. (kmb40)



Terus Merugi ✓

Pengelolaan Kapal Roro Disarankan Libatkan Pihak Ketiga

Semarapura (Bali Post) -

Ketidakmampuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengelola kapal ro-ro menjadi sorotan DPRD Klungkung. Dewan mengusulkan agar kapal ini dikelola melibatkan pihak ketiga. DPRD pesimis pengelolaan kapal ro-ro oleh Dishubkominfo bisa mendatangkan keuntungan, setelah terus merugi sejak dibeli tahun 2006.

Anggota DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata, Rabu (25/3) kemarin mengatakan masalah pengelolaan kapal ro-ro setelah pengangkutan BBM ke Nusa Penida oleh *suplayer* beralih menggunakan kapal LCT (*Landing Craft Tank*), sempat dibahas bersama di Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Komisi II DPRD Klungkung juga sempat hadir saat itu. Dalam situasi ini, mau tidak mau Dishubkominfo Klungkung diminta mencari alternatif lain, untuk menambah pendapatan dari operasional kapal ro-ro. Selain alternatif pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga, juga alternatif lain, dengan menambah jumlah *shift* penyeberangan. Paling tidak dari satu *shift* menjadi dua *shift* setiap hari.

Legislator Partai Hanura ini mengungkapkan, Pemprov Bali saat itu menyatakan tidak mungkin mencabut izin yang dikeluarkan untuk operasional kapal LCT yang mengangkut BBM ke Nusa Penida. Apalagi, kapal ro-ro sebenarnya juga tidak layak mengangkut BBM dan penumpang sekaligus, karena dinilai sangat berbahaya. "Sehingga, alternatif yang paling tepat, kapal ro-ro sebaiknya dikelola pihak ketiga. Bisa lewat Pelindo atau ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan)," katanya.

Ia meminta Dishubkominfo Klungkung tidak usah ngotot lagi agar Dishub Bali mencabut izin operasional kapal LCT. Sebab, persoalan ini pada dasarnya telah menjadi kelemahan Dishubkominfo yang terkesan gagal mengelola kapal ro-ro, lantaran setiap tahun terus merugi.

Kadishubkominfo Klungkung Nengah Sukasta belum berkenan memberikan tanggapan. Sejak dibeli tahun 2006 seharga Rp 18 miliar dan diresmikan penggunaannya pada 28 April 2007, kapal ro-ro belum sekalipun meraup keuntungan. Setiap tahun total anggaran operasional kapal ro-ro sekitar Rp 5 miliar lebih, sementara pendapatan sekitar Rp 3,5 miliar lebih. Berarti masih ada subsidi sekitar Rp 1,5 miliar. Dengan kehilangan pendapatan lagi Rp 1,2 miliar karena *suplayer* beralih menggunakan kapal LCT, maka total subsidi dipastikan bakal membengkak lagi, jika tidak dikelola pihak ketiga.

Transportasi laut dengan kapal ro-ro, menjadi salah satu alternatif bagi daerah yang memiliki wilayah kepulauan. Seperti Kabupaten Klungkung, kapal ro-ro awalnya menjadi transportasi andalan guna menghubungkan masyarakat Nusa Penida dengan pulau Bali. Seiring perkembangan zaman, saat ini ragam transportasi laut mulai bermunculan. Perkembangan transportasi laut pun menjadi mimpi buruk bagi pengelolaan kapal ro-ro, yang mulai ditinggalkan masyarakat. (kmb31)

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 16